

RENCANA STRATEGIS
PERUBAHAN
DINAS
PERHUBUNGAN

TAHUN 2018-2023

**PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

**KONSEP
PERUBAHAN RENSTRA
DINAS PERUBAHAN
TAHUN 2018-2023**

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan dan rahmatnya Dokumen Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 memuat Delapan Bab, antara lain

- 1) Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan;
- 2) Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Sumber Daya Dinas Perhubungan, Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3) Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Dinas Perhubungan Jabar, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.
- 4) Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
- 5) Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
- 6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta;
- 7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta; dan

8) Bab. Penutup memuat tentang ringkasan Perubahan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023.

Dalam penyusunan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan ini menggunakan pendekatan logical framework sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Dinas Perhubungan untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta ini diharapkan menjadi acuan bagi Dinas Perhubungan dan seluruh stakeholder untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan di Kabupaten Purwakarta

Purwakarta,

2021



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

R.IWAN SOEROSO SOEDIRO,ST
NIP. 19720228N200312 1 003

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 3
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4 Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	II - 1
2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan	II - 3
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	II - 8
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan	II - 19
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan	III - 1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 2
3.3 Telaahan Renstra K/ L dan Renstra PD Provins..	III - 5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis	III - 9
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 11
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan	IV - 1
4.2 Sasaran.....	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V - 1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII - 1
BAB VIII PENUTUP	VIII -

DAFTAR TABEL

		Hal
TABEL 2.1	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	II -
TABEL 2.2	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Golongan Tahun 2020	II
TABEL 2.3	Rekapitulasi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020	II
TABEL 2.4	Pencapaian Kinerja Kabupaten Purwakarta Pelayanan Dinas Perhubungan	II
TABEL 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD	II
TABEL 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	IV
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V
TABEL 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 20	VI
TABEL 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023	VII

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dipedomani selama ini.

Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan sesuai dengan kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien serta akan menghasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -- 2024, Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 119 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 sehingga wajib melaksanakan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,



- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 9);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023;
 22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 148);
 23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023 ini adalah :

1. Memberikan Arah dan Pedoman Bagi Seluruh Personil Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya terkait Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan.
2. Memberikan informasi tentang kondisi pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sekaligus memberikan pemahaman arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
3. Mempermudah Pengendalian Kegiatan Serta Pelaksanaan Koordinasi Dengan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta Terutama Terkait Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan urusan Perhubungan.



4. Menjadi Kerangka Dasar Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Guna Menunjang Pencapaian Target Kinerja Pembangunan Daerah Terutama Pada Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Yang Bersifat Tahunan

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan, Perencanaan, dan Kegiatan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
2. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
3. Pelaksanaan administrasi urusan Pemerintahan bidang Perhubungan; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat, membawahkan :

- 1 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

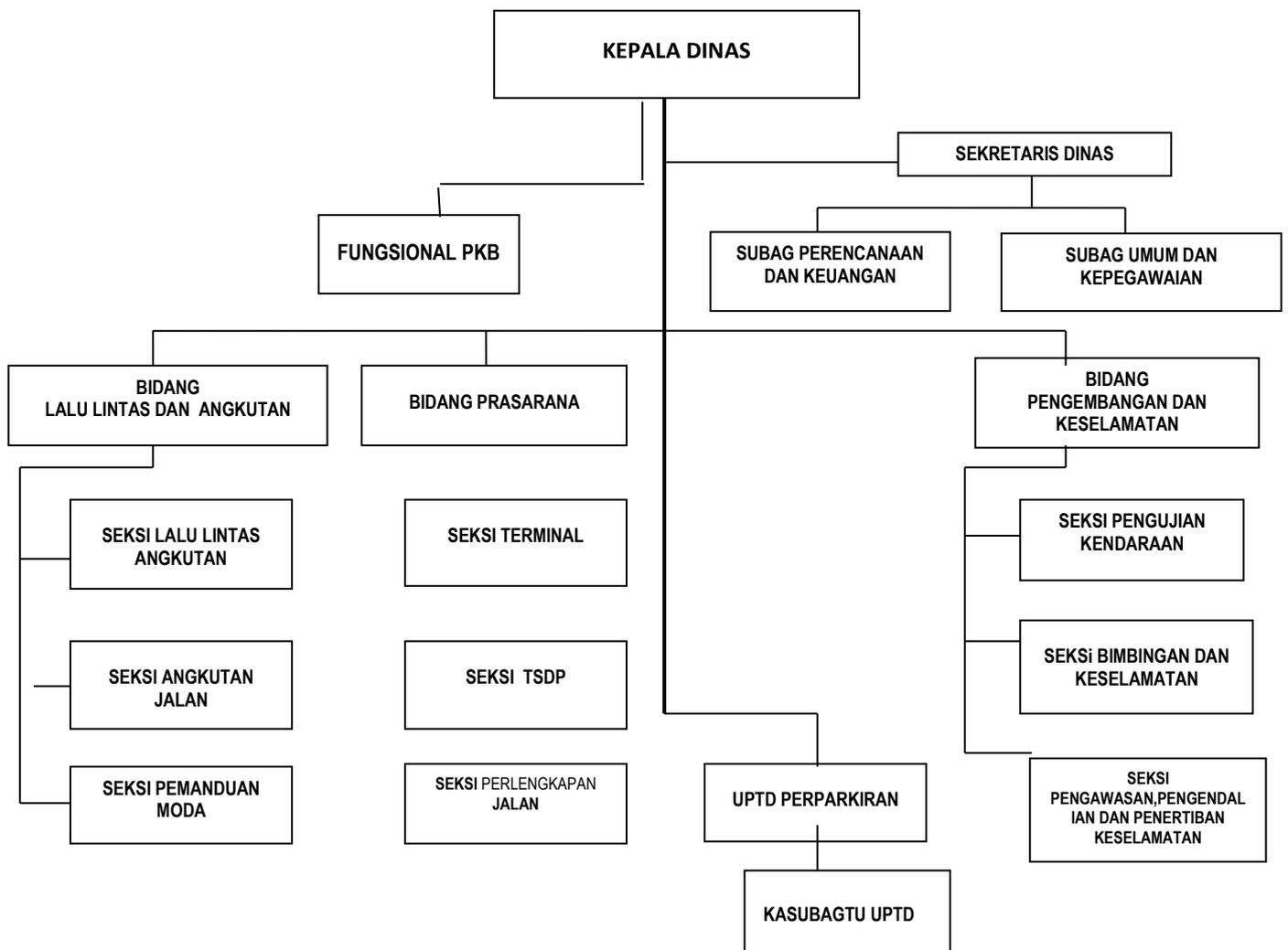
C. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan (LLA), terdiri dari :

- 1 Seksi Lalu Lintas Jalan (LLJ);
- 2 Seksi Angkutan Jalan (AJ); dan
- 3 Seksi Pemaduan Moda (PM).



- D. Bidang Prasarana, membawahkan :
 - 1 Seksi Terminal;
 - 2 Seksi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP); dan
 - 3 Seksi Perlengkapan Jalan (PJ).
- E. Pengembangan dan Keselamatan, membawahkan :
 - 1 Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 - 2 Seksi Bimbingan dan Keselamatan (BK); dan
 - 3 Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban (P3).
- F. UPTD Perpajakan, terdiri atas :
 - 1 Kepala UPTD Perpajakan;
 - 2 Ka. Subag TU UPTD Perpajakan;

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA





2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta didukung oleh sumber daya aparatur sejumlah 91 orang, terdiri dari 18 pejabat struktural, 2 orang pejabat fungsional, dan 71 staf serta 20 PTT dan 155 Tenaga Harian Lepas.

A. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

Sumber daya aparatur Dinas Perhubungan didukung oleh 234 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 32 orang perempuan.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG		LAKAI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SEKRETARIAT	PNS	10	6
		PTT	1	1
		THL	8	6
	JUMLAH	32	19	13
2.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PNS	15	2
		PTT	3	0
		THL	10	7
	JUMLAH	37	28	9
3.	BIDANG PRASARANA	PNS	23	0
		PTT	4	0
		THL	14	1
	JUMLAH	42	41	1
4.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	PNS	27	0
		PTT	4	0
		THL	82	4
	JUMLAH	117	113	4
5.	UPTD PERPARKIRAN	PNS	6	2
		PTT	6	1
		THL	22	2
	JUMLAH	39	34	5
JUMLAH TOTAL			235	32

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, 2018

B. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta memiliki 18 pejabat struktural, 2 pejabat fungsional tertentu dan 71 fungsional umum, 21 PTT serta 155 Tenaga Harian Lepas.



Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Menurut Jabatan

NO	BIDANG	STRUKTURAL	FUNGSIONAL TERTENTU (Penguji)	FUNGSIONAL UMUM	PTT	THL	JUMLAH
1.	SEKRETARIAT	4	0	12	3	14	32
2.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	4	2	14	3	17	37
3.	BIDANG PRASARANA	4		19	4	15	42
4.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	4		23	4	86	117
5.	UPTD PERPARKIRAN	2		6	7	24	39
	JUMLAH	18	2	71	20	155	267

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan, 2020

C. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur Dinas Perhubungan terdiri dari 1 orang berpendidikan Sekolah Dasar, 1 orang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 4 orang berpendidikan Diploma, 18 orang berpendidikan Diploma-IV/Strata-1, dan 9 orang berpendidikan Strata-2/Magister.

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan

NO	BIDANG		SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	JML
1.	SEKRETARIAT	PNS	0	0	8	1	0	4	3	16
		PTT	0	0	2	0	0	0	0	2
		THL	1	1	10	1	0	1	0	14
	JUMLAH		1	1	20	2	0	5	3	32
2.	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	PNS	0	0	10	1	0	3	3	17
		PTT	1	0	2	0	0	1	0	4
		THL	0	0	16	0	0	1	0	17
	JUMLAH		1	0	18	10	0	5	3	37
3.	BIDANG	PNS	0	4	15	1	0	3	0	23



	PRASARANA	PTT	2	0	1	0	0	1	0	4
		THL	0	0	12	1	0	2	0	15
	JUMLAH		3	4	28	2	0	6	0	42
4.	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	PNS	4	6	13	0	0	3	1	27
		PTT	0	2	2	0	0	0	0	4
		THL	5	11	65	2	1	2	0	86
	JUMLAH		9	19	80	2	1	5	1	117
5.	UPTD PERPARKIRAN	PNS	0	0	4	0	0	4	0	8
		PTT	0	0	7	0	0	0	0	7
		THL	2	6	15	0	0	1	0	24
	JUMLAH		2	6	26	0	0	5	0	39
TOTAL			16	29	172	16	1	26	7	267

D. Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan Kepangkatan

Berdasarkan golongan kepangkatan aparatur sipil negara, Dinas Perhubungan terdiri dari 1 orang menduduki golongan I, 20 orang menduduki golongan II, 47 orang golongan III, dan 5 orang golongan IV.

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Menurut Golongan

No	BIDANG	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV
1	SEKRETARIAT	0	8	5	3
2	BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	0	9	6	2
3	BIDANG PRASARANA	2	18	5	1
4	BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN	5	15	5	1
5	UPTD PERPARKIRAN	0	4	4	0
	J U M L A H	7	54	24	7

E. Sarana dan Prasarana Perlengkapan Dinas Perhubungan



Prasarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta terdiri dari :

1. Gedung Kantor Dinas Perhubungan yang terletak di Jl. Veteran No.1 Purwakarta;
2. Gedung Unit Pengeujian Kendaraan Bermotor di Jl. Veteran No.1 Purwakarta;
3. Gedung UPTD Parkir yang terletak di Jl. Veteran No.1 Purwakarta;

Sarana aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat diklasifikasikan menurut jenis dan fungsinya sebagai :

1. Kendaraan Jabatan yang terdiri dari :
 - a. Kendaraan Roda 4 sebanyak 5 Unit untuk pejabat Eselon II dan III;
 - b. Kendaraan Roda 2 sebanyak 14 Unit untuk pejabat Eselon IV.
2. Kendaraan Roda 4 sebanyak 6 Unit untuk operasional :
 - a. Unit Pengujian Keliling
 - b. Bis sekolah
 - c. Pick Up Operasional Amdal lalu Lintas;
 - d. Pick Up Operasioanal UPTD Parkir
 - e. Pick Up Operasioanal Pengendalian pengawasan 2 (dua) Unit
 - f. Pick Up Operasional Bidang Prasarana 2 (dua) unit
 - g. Kijang Mini Bus Operasional Pemeliharaan Perlengkapan Fasilitas Perhubungan
3. Kendaraan Operasional Roda 2 sebanayak 7 (tujuh) Unit Operasioanal Seksi Dalwas, dan 1 (satu) Unit Operasional UPTD Parkir

Peralatan Gedung Kantor dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5 Komposisi Perlengkapan Dinas Perhubungan



DAFTAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Genset	1	Unit	Baik
2	Gense	1	Unit	Kurang Baik
3	Brake Tester	1	Unit	Rusak
4	Axle Load	1	Unit	Rusak
5	Smoke Tester	1	Unit	Rusak
6	Gas Analyzer	1	Unit	Rusak
7	Head Light Tester	1	Unit	Rusak
8	Air Compressor	1	Unit	Kurang Baik
9	Air Compressor	1	Unit	Rusak
10	Diesel Smoke Analyzer	1	Unit	Rusak
11	Diesel Smoke Tester	1	Unit	Rusak
12	Diesel Smoke Tester	1	Unit	Rusak
13	Gas Analyzer	1	Unit	Rusak
14	Gas Analyzer	1	Unit	Rusak
15	Slagh Nomor/ Leter	1	Unit	Kurang Baik
16	Kendaraan PKB Keliling	1	Unit	Kurang Baik
17	Side Slip Tester	1	Unit	Rusak
18	Side Slip Tester	1	Unit	Kurang Baik
19	Smoke Tester	1	Unit	Rusak
20	Gas Analyzer	1	Unit	Kurang Baik
21	Alat Uji Rem Portabel / Portable Brake Meter	1	Unit	Baik
22	Alat Uji Kebisingan / Sound Level Meter	1	Unit	Baik
23	Alat Uji Kepekatan Kaca / Tint tester	1	Unit	Baik
24	Alat Uji Suspensi Portabel / Portable Suspension Meter	1	Unit	Baik
25	Alat Uji Minyak Rem / Brake Fluid Meter	1	Unit	Baik
26	Smoke Tester	1	Unit	Baik
27	Gas Analyzer	1	Unit	Rusak
28	Alat Uji Kebisingan / Sound Level Meter	1	Unit	Baik
29	Alat Uji Kepekatan Kaca / Tint tester	1	Unit	Baik



30	Alat Uji Lampu Utama Kendaraan Bermotor / Head Light Tester	1	Unit	Kurang Baik
31	Alat Uji Akurasi Kecepatan / Speedometer Tester	1	Unit	Baik
32	Alat Ukur Kedalaman Alur Ban / Digital Tire Depth Gauge	1	Unit	Baik
33	Air Compressor	1	Unit	Baik
34	Genset Kecil	2	Unit	Baik
35	Tool Set	2	Unit	Baik

DAFTAR PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	AC Unit	14	Unit	Baik
2	Exhause Fan	3	Unit	Baik
3	AC Standing	1	Unit	Baik
4	Camera Digital	2	Unit	Baik
5	Dispencer	9	Unit	Baik
6	Filling Besi/Metal	13	Unit	Baik
7	Lemari Besi/Metal	28	Unit	Baik
8	Roll O Pack	3	Unit	Baik
9	Lemari Kaca Pajangan	3	Unit	Baik
10	Kipas Angin Dinding	9	Unit	Baik
11	Kipas Angin Duduk Besar	1	Unit	Baik
12	Mesin Absen Jari	2	Unit	Baik
13	Mesin Absen Wajah	1	Unit	Baik
14	Speaker Aktiv	2	Unit	Baik
15	Zice/Kursi Tamu	2	Set	Baik
16	Kursi Sofa	2	Set	Baik
17	Harddisk External (2 Tera)	4	Unit	Baik
18	Harddisk External (1 Tera)	2	Unit	Baik
19	Harddisk External (500 GB)	1	Unit	Baik
20	Proyektor	1	Unit	Baik
21	Layar Infokus	1	Unit	Baik



DAFTAR PERALATAN KANTOR DAN RUMAH TANGGA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	Baik
2	Handy Talky (HT)	108	Unit	Baik
3	Kompore Gas	1	Unit	Baik
4	Tabung Gas	1	Unit	Baik
5	Mesin Bor Bobok	1	Unit	Baik
6	Mesin Potong Rumput	2	Unit	Baik
7	P.C. Unit	19	Unit	Baik
8	Printer	19	Unit	Baik
9	Printer Dot Matrik	1	Unit	Baik
10	Mesin Printer Smart Card	1	Unit	Baik
11	Laptop	12	Unit	Baik
12	Wireles Microphone Meja Rapat	1	Unit	Baik
13	Televisi	4	Unit	Baik
14	Scanner	3	Unit	Baik
15	Speaker Box Ruangan	1	Unit	Baik
16	Spray Tanky Semprot	2	Unit	Baik
17	Server	1	Unit	Baik
18	Thermo Gun	6	Unit	Baik
19	Barrier Parkir	3	Paket	Baik
20	Display Neon Box Reklame	1	Unit	Baik
21	Running Tex	1	Unit	Baik

DAFTAR MEUBELAIR

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Kursi Lipat	20	Unit	Baik
2	Kursi Putar	30	Unit	Baik
3	Kursi Tamu Bundar	3	Set	Baik
4	Lemari Es	2	Unit	Baik
5	Lemari Kayu Arsip	3	Unit	Baik
6	Meja 1/2 Biro	5	Unit	Baik
7	Meja 1 Biro	1	Unit	Baik
8	Meja Kerja Kayu	50	Unit	Baik
9	Podium	1	Unit	Baik



10	Meja Kerja Pejabat	1	Unit	Baik
11	Kursi Kerja Pejabat	1	Unit	Baik
12	Meja Piket	2	Set	Baik
13	Meja Rapat	2	Set	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta bisa dikatakan telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang muncul hanya bersifat elementer yang masih mampu diatasi melalui pendekatan berkelanjutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap para pegawai yang ada di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.

Arah kebijakan pembangunan bidang perhubungan ditujukan terutama kepada peningkatan pengelolaan arus lalu lintas (traffic management). Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, serta Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pembinaan terhadap pengelola jasa angkutan umum serta melakukan pengumpulan dan analisis database pelayanan angkutan, sedangkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan secara rutin dan periodik di beberapa kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan, termasuk ketika menjelang dan sesudah hari libur keagamaan seperti lebaran, natal, dan tahun baru. Berikut adalah Tabel Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 – 2018.

Tabel 2.6
Perkembangan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 - 2018



No	Uraian	Capaian Kinerja				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	Urusan Wajib					
I	Perhubungan					
1.	Jumlah Ijin Trayek (Per 10.000 Penduduk)	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
2.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum (Buah)	13.536	14.389	14.358	11.270	10.952
3.	Jumlah Terminal Bis	4	4	4	4	4
4.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%)	279	296	329	304	345
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)(Menit)	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5
6.	Pemasangan Rambu-rambu (Unit)	96	166	83	159	42
7.	Jumlah Penumpang melalui Terminal Per Tahun (Orang)	890.869	825.351	831.635	925.635	977.633

2.4 Kondisi Sektor Perhubungan

Pada sektor perhubungan/ pelayanan transportasi di Kabupaten Purwakarta dapat dibedakan menjadi layanan transportasi darat dan layanan transportasi danau, dimana keduanya sangat penting dalam mobilisasi orang dan/ atau barang. Hal ini tergantung pula pada ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur yang sangat penting dalam mempercepat dan mengarahkan perkembangan wilayah.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran seluruh aktivitas sosial ekonomi sangat dipengaruhi oleh dukungan/ ketersediaan infrastruktur wilayah dan fasilitas umum yang ada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa suatu daerah/ wilayah yang telah memiliki infrastruktur dan fasilitas umum yang memadai, mempunyai nilai tambah yang tidak kecil bagi penduduk dan kegiatan usaha, selain itu juga mempunyai nilai kompetitif lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Karakteristik ketersediaan prasarana dan sarana angkutan dan lain-lain akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana dibawah ini.

❖ Sarana Kendaraan/ Angkutan Umum

Kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana yang sangat penting dalam rangka menunjang mobilitas/ pergerakan



orang/ penumpang maupun barang, dimana dalam sifat pelayanannya kendaraan bermotor ini dapat dibagi kedalam kelompok kendaraan pribadi dan kelompok kendaraan umum.

Tabel 2.7 Komposisi Kendaraan Umum yang melakukan Uji KIR Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Kendaraan	Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018
I.	MOBIL BIS					
	1. Otobis (Bis Besar)	290	206	135	7	2
	2. Bis Micro (Bis Sedang)	156	190	182	138	131
	3. Bis Mini (Bis Kecil)	43	52	49	49	30
	4. Angkutan Kota	962	956	913	794	685
	5. Angkutan Perkotaan	1,016	931	850	706	602
I.	MOBIL BARANG					
	1. Truck/Bak terbuka	3,452	3,163	3,425	2,117	1,988
	2. Pick Up	6,034	6,979	6,494	5,928	5,972
	3. Box/Bak Tertutup	1,302	1,528	1,904	1,314	1,341
	4. Tanki	73	219	48	20	13
	5. Bestel Wagon	37	26	35	17	15
	6. Tractor Head	14	16	16	15	4
	7. Kereta Gandengan	6	0	0	0	0
	8. Kereta Tempelan	11	16	16	12	4
	9. Ambulance	3	3	10	2	3
	10. Blind Van	49	74	115	72	127



JUMLAH	13.493	14.359	14.192	11.191	10.917
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Sementara itu layanan angkutan penumpang umum sebagai moda alternatif untuk melakukan aktivitas dapat dikatakan masih terbatas. Sistem jaringan angkutan penumpang umum meliputi rute trayek dan simpul transportasi meliputi terminal dan sub terminal/pangkalan. Secara umum jaringan angkutan umum sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta dengan penyebaran relatif merata. Meskipun demikian sebagian besar angkutan umum tersebut adalah berkapasitas kecil (s/d 12 orang). Demikian juga apabila ditinjau dari segi pelayanannya masih jauh dari memadai sebagai angkutan umum perkotaan.

Adapun trayek angkutan penumpang di Kabupaten Purwakarta terdiri dari Trayek Angkutan Kota dan Trayek Angkutan Perdesaan. Komposisi Angkutan Kota dan Trayek Angkutan Perdesaan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8
Komposisi Angkutan Kota dan Angkutan Perdesaan di Kabupaten Purwakarta

No.	Trayek	Kode Lintasan	2014	2015	2016	2017	2018
I ANGKUTAN KOTA							
1	Jalur : 01	01	132	132	132	132	132
2	Jalur : 02	02	135	135	135	135	135
3	Jalur : 03	03	91	91	91	91	91
4	Jalur : 04	04	63	63	63	63	63
5	Jalur : 05	05	84	84	84	84	84
6	Jalur : 06	06	55	55	55	55	55
7	Jalur : 07	07	99	99	99	99	99
8	Jalur : 08	08	20	20	20	20	20
9	Jalur : 09	09	62	62	62	62	62
	Jumlah		741	741	741	741	741
II ANGKUTAN PERDESAAN							
10	CIGANEA-UBRUG	1A	67	67	67	67	67
11	SIMPANG-CIGANEA-PARAKANLIMA	1B	21	22	22	22	22



12	CIGANEA-SUKATANI-PASAR CITEKO	1C	72	77	77	77	77
13	CIGANEA-CILEGONG-CIKAO BANDUNG	1E	31	31	31	31	31
14	SIMPANG-PASAWAHAN-WANAYASA	2A	90	90	90	90	90
15	SIMPANG-PASAWAHAN-SUKAJADI	2B	0	0	0	0	0
16	SIMPANG-PASAWAHAN-TANJUNGSARI	2C	0	0	0	0	0
17	SIMPANG-TANJUNGSARI	2D	0	0	0	0	0
18	SIMPANG-TARINGGUL LANDEUH-CIHEULANG	2E	8	8	8	8	8
19	SIMPANG-PASAWAHAN-CIHERANG	2F	20	20	20	20	20
20	SIMPANG-BOJONG	2G	0	0	0	0	0
21	SIMPANG-ASEM	2H	0	0	0	0	0
22	SADANG-WANAKERTA (PERUM BIC)	3A	21	21	21	21	21
23	SADANG-CIPARUNGSARI	3B	0	0	0	0	0
2	SADANG-WANAWALI	3C	0	0	0	0	0
25	SADANG-WARUNGKADU	3D	0	0	0	0	0
26	SADANG-MUNJUL JAYA	3E	0	0	0	0	0
27	SADANG-CISANTRI-TANJUNG GARUT	4A	20	20	20	20	20
28	PASAR CITEKO-SIMPANG-WARUNG JERUK	4B	40	40	40	40	40
29	PASAR CITEKO-CILANGKAP-WARUNG JERUK	4C	20	20	20	20	20
30	PASAR CITEKO-CIDONGKOL	4D	0	0	0	0	0
31	PASAR CITEKO-SAWIT-BOJONG-WANAYASA	4E	80	80	80	80	80
32	PASAR CITEKO-MANIIS	4F	7	21	21	21	21
33	PASAR CITEKO-LIUNGGUNUNG	4G	0	0	0	0	0
34	PASAR CITEKO-CISARUA	4H	0	0	0	0	0
35	PASAR CITEKO-SUKAMULYA	4J	0	0	0	0	0



36	PASAR CITEKO-CISOMANG	4K	20	20	20	20	20
37	PASAR CITEKO-TAJUR SINDANG	4L	0	0	0	0	0
38	GANDASOLI-CITEKO	4M	23	23	23	23	23
39	WANAYASA-SINDANGPANON	5A	0	0	0	0	0
40	WANAYASA-CIKUBANG-MEKARJAYA	5B	0	0	0	0	0
41	SAWIT-PASIRANGIN	6	0	0	0	0	0
42	BABAKAN CIKAO-CILANGKAP-CURUG	7	44	44	44	44	44
43	WANAYASA-BABAKAN-MEKARJAYA	8	0	0	0	0	0
44	PASAWAHAN-WANAWALI	9	0	0	0	0	0
45	PASAR ANYAR SUKATANI-PANYINDANGAN	10	0	0	0	0	0
46	SIMPANG-WANAYASA	10	8	8	8	8	8
	Jumlah		592		612	612	612
	ANGKUTAN PERBATASAN						
47	TER.WANAYASA-SAGALAHERANG-JL.CAGAK	15.18.0379	30	30	30	30	30
48	SIMPANG-PASAWAHAN-WNY-SAGALAHERANG (Trayek Pelimpahan dari Propinsi Jawa Barat)	15.18.1418	0	0	0	0	0
49	PASAR CITEKO-CIPEUNDEUY (BANDUNG)	110	5	5	5	5	5
50	SADANG-CIPEUNDEUY-PABUARAN	15.18.0370	12	12	12	12	12
	JUMLAH		47	47	47	47	47
	JUMLAH KESELURUHAN		1,380	1.400	1.400	1.400	1.400

Dalam menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang perlunya penyediaan terminal, dimana terminal ini merupakan prasarana transportasi jalan yang berfungsi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/ atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.



Tabel 2.10
Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Purwakarta

No.	Nama	Tipe	Lokasi
1.	Teminal Ciganea	C	Kec.Jatiluhur
2.	Sub Terminal Citeko/Plered	Sub Terminal	Kec. Plered
3.	Sub Terminal Simpang Rebo	Sub Terminal	Kec. Purwakarta
4.	Sub Terminal Wanayasa	Sub Terminal	Kec. Wanayasa

❖ **Sarana Kendaraan/ Angkutan Umum**

Perlengkapan jalan mutlak diperlukan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta untuk memberikan kemudahan bagi pemakai jalan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang termasuk kedalam perlengkapan jalan meliputi :

- 1) Rambu-rambu;
- 2) Marka Jalan;
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- 4) Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan;
- 5) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan;
- 6) Fasilitas Pendukung.

Untuk lebih jelasnya mengenai perlengkapan jalan diatas akan diuraikan sebagaimana dibawah ini.

1) Rambu-rambu

Rambu-rambu terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu :

- 1.2 Rambu Peringatan;
- 1.3 Rambu Larangan;
- 1.4 Rambu Perintah;
- 1.5 Rambu Petunjuk;

Adapun jumlah rambu yang sudah terpasang dalam kurun waktu 2014 – 2018 di Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.11
Data Rambu-rambu Lalu Lintas di Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Pengaman/Pengarah Arus Lalu Lintas	Jumlah	Lokasi	Keterangan
1	Rambu Standar	114 Unit	Jl. Kolonel Rohmat Jl. Kapten Halim Jl. Veteran Jl. Sudirman	Terpasang
2	Rambu Standar Papan Tambahan	10 Unit	Jl. Ahmad Yani Jl. Veteran Jl. Taman Pahlawan Jl. Kapten Halim	Terpasang
3	Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ)	31 Unit	Jl. Veteran Jl. Sudirman Jl. R.E Martadinata	Terpasang
4	Rambu Portable Larangan Sepeda	4 Unit	Areal Situ Buled	Terpasang
5	Rambu Portable Arah Pejalan Kaki	5 Unit	Areal Situ Buled	Terpasang
6	Cermin	2 Unit	Jl. Ciwareng Jl. Kopi	Terpasang
7	Traffict Light	6 Buah	Pertigaan Ciganea Pertigaan Parcom Perempatan H. Iming Perempatan Kebon Kolot Perempatan Jl. Sadang Perempatan Jl. Cikopo	Rusak Rusak Rusak Rusak Terpasang Terpasang

2) Marka Jalan

Marka Jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau memperingatkan atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan, marka ini terdiri dari :

- 2.1 Marka membujur;
- 2.1 Marka melintang;
- 2.2 Marka serong;
- 2.5 Marka lambing;
- 2.5 Marka lainnya.

3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) ini berfungsi untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki. APILL ini terdiri dari :

- 3.1 Lampu 3 (tiga) warna, untuk mengatur kendaraan dengan susunan cahaya berwarna merah, kuning dan hijau;



- 3.2 Lampu 2 (dua) warna, untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki dengan susunan cahaya berwarna merah dan hijau;
- 3.3 Lampu 1 (satu) warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan berupa cahaya berwarna kuning atau merah kelap-kelip.

4) Alat Pengendali dan Pengamanan Pemakai Jalan

Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :

- 4.1 Alat pembatas kecepatan;
- 4.2 Alat pembatas tinggi dan lebar.

Sedangkan alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengamanan terhadap pemakai jalan terdiri dari :

1. Pagar pengaman;
2. Cermin tikungan;
3. Delinator;
4. Pulau-pulau lalu lintas;
5. Pita pengaduh.

Dalam pemenuhan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, lebih banyak ditetapkan berdasarkan skala prioritas atas dasar permohonan dari lembaga/ instansi dengan melihat kondisi di lapangan.

5) Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatannya. Alat ini dapat berupa penimbangan yang dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat dipindah-pindahkan (portable). Adapun alat penimbangan yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah 1 (satu) set alat timbang portable dan alat penimbangan yang dipasang secara tetap, yaitu terpasang dengan peralatan lainnya untuk pengujian kendaraan bermotor.



6) Fasilitas Pendukung

Yang dimaksud dengan fasilitas pendukung adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, baik yang berada di jalan maupun diluar badan jalan dalam rangka keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan. Fasilitas pendukung meliputi :

- 6.1 Fasilitas pejalan kaki;
- 6.2 Parkir pada badan jalan;
- 6.3 Halte, tempat istirahat;
- 6.4 Penerangan jalan.

Fasilitas pejalan kaki terdiri dari :

1. Trotoar;
2. Tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/ atau rambu-rambu;

❖ Taman Kendaraan

Taman kendaraan merupakan potensi pendapatan daerah, dengan melihat bahwa kendaraan-kendaraan tersebut merupakan kendaraan wajib uji. Sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai dengan kelas jalan yang dilalui. Oleh karena itu kendaraan tersebut harus dilakukan pengujian, hal ini dimaksudkan agar kendaraan yang akan dipergunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan yang harus dipenuhi.

❖ Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pengelolaan angkutan sungai, danau dan penyeberangan belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perhubungan. Hal ini disebabkan karena belum adanya penyerahan urusan kewenangan ASDP



dari Pemerintah Pusat/ Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak dapat melaksanakan pengelolaan ASDP tersebut secara optimal.

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan merupakan transportasi danau yang keberadaannya ada di Waduk Jatiluhur. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di system transportasi darat, bahwa angkutan inipun ada jalur lintasannya, ada dermaga, ada kapal/ perahu yang laik “melaut” dan sebagai bukti, kapal tersebut harus memiliki Surat Kelaikan dan Juru Mudinya memiliki Surat Tanda Kecakapan (STK). Untuk sementara ini angkutan tersebut pengelolaannya masih dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat melalui Balai PPLASDP. Dengan melihat secara letak geografis ASDP ini berada di Wilayah Kabupaten Purwakarta dan dalam rangka persiapan apabila urusan ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Perhubungan telah dilaksanakan Studi Potensi PAD, Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan ASDP dan terakhir telah diadakan penyuluhan terhadap Para Juru Mudi ASDP.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Revisi Rencana Strategis ini selama 2 (Dua) tahun kedepan akan melakukan kegiatan secara nyata terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dalam jasa pelayanan bidang perhubungan.

Analisis Lingkungan merupakan hal yang penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Analisis lingkungan terdiri dari Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE). Pemahaman terhadap lingkungan internal maupun eksternal akan memberikan pemahaman terhadap organisasi mengenai kondisi dan kemampuan organisasi. Dengan mengetahui kondisi-kondisi internal maupun eksternal organisasi akan diketahui kekuatan,



kelemahan, peluang dan ancaman/tantangan yang mempengaruhi organisasi. Analisis lingkungan diperlukan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon setiap perkembangan keadaan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Dinas Perhubungan metode yang akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal tersebut ialah metode Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities and Threats) dengan maksud implementasi ini akan membantu organisasi untuk memperkuat keunggulannya guna mengatasi ancaman yang dihadapi dan menangkap peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan yang dimilikinya.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis terhadap lingkungan internal dilakukan melalui pencermatan (scaning) lingkungan internal Organisasi Dinas Perhubungan yang memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan organisasi sebagai berikut :

➤ **Kekuatan (Strenght)**

- 1) Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perhubungan .
- 2) Tersedianya SDM aparatur dengan jumlah yang cukup.
- 3) Lokasi/ lahan Dinas Perhubungan yang sangat luas.
- 4) Iklim dan suasana kerja yang kondusif.

➤ **Kelemahan (Weakness)**

- 1) Sistem penilaian aparat yang belum memadai.
- 2) Kemampuan teknis, substantif dan fungsional SDM aparatur Dinas Perhubungan relatif belum memadai.
- 3) Masih adanya sikap aparatur yang memiliki tingkat disiplin dan etos kerja yang rendah.
- 4) Sarana Gedung Kantor yang belum memadai
- 5) Dukungan dana yang relatif terbatas.



2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Analisis terhadap lingkungan eksternal dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan eksternal organisasi Dinas Perhubungan yang memperlihatkan peluang dan ancaman sebagai berikut :

➤ **Peluang (Opportunities)**

- 1) Adanya program pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan fungsional.
- 2) Posisi strategis Kabupaten Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas pusat kegiatan nasional yaitu Jakarta – Bandung – Cirebon.
- 3) Tersedianya akses jalan Tol yang menghubungkan Purwakarta dengan daerah lain.
- 4) Aksesibilitas jalan semakin meningkat dan bertambah baik sampai ke pelosok perdesaan.
- 5) Adanya mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan..

➤ **Ancaman (Threats)**

- 1) Perencanaan transportasi yang belum optimal menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan.
- 2) Situasi dan kondisi ekonomi serta politik yang belum stabil.
- 3) Pengaruh mengglobalnya Teknologi Informasi (IT).

Untuk mengetahui prioritas faktor lingkungan strategis berdasarkan pembobotan, rating dan score terlebih dahulu mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal.

Identifikasi Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

NO	LINGKUNGAN INTERNAL	NO	LINGKUNGAN EKSTERNAL
1.	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perhubungan.	1.	Adanya program pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan fungsional.
2.	Tersedianya SDM aparatur dengan jumlah yang cukup.	2.	Posisi strategis Kabupaten Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas pusat kegiatan nasional yaitu Jakarta – Bandung – Cirebon.
3.	Lokasi/ lahan Dinas Perhubungan yang sangat luas.	3.	Tersedianya akses jalan Tol yang menghubungkan Purwakarta dengan daerah lain.
	Iklm dan suasana kerja yang		Aksesibilitas jalan semakin



4.	kondusif.	4.	meningkat dan bertambah baik sampai ke pelosok perdesaan. Adanya mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan
NO	KELEMAHAN (WEAKNESS)	NO	ANCAMAN (THREATS)
1.	Sistem penilaian aparat yang belum memadai.	1.	Perencanaan transportasi yang belum optimal menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan.
2.	Kemampuan teknis, substantif dan fungsional SDM aparatur Dinas Perhubungan relatif belum memadai.	2.	Situasi dan kondisi ekonomi serta politik yang belum stabil.
3.	Masih adanya sikap aparatur yang memiliki tingkat disiplin dan etos kerja yang rendah.	3.	Pesatnya pertumbuhan pesaing di daerah-daerah lain.
4.	Sarana Gedung Kantor yang tidak memadai.	4.	Pengaruh globalisasi Teknologi Informasi (IT).
5.	Dukungan dana yang relatif terbatas.		

Analisa Faktor Lingkungan

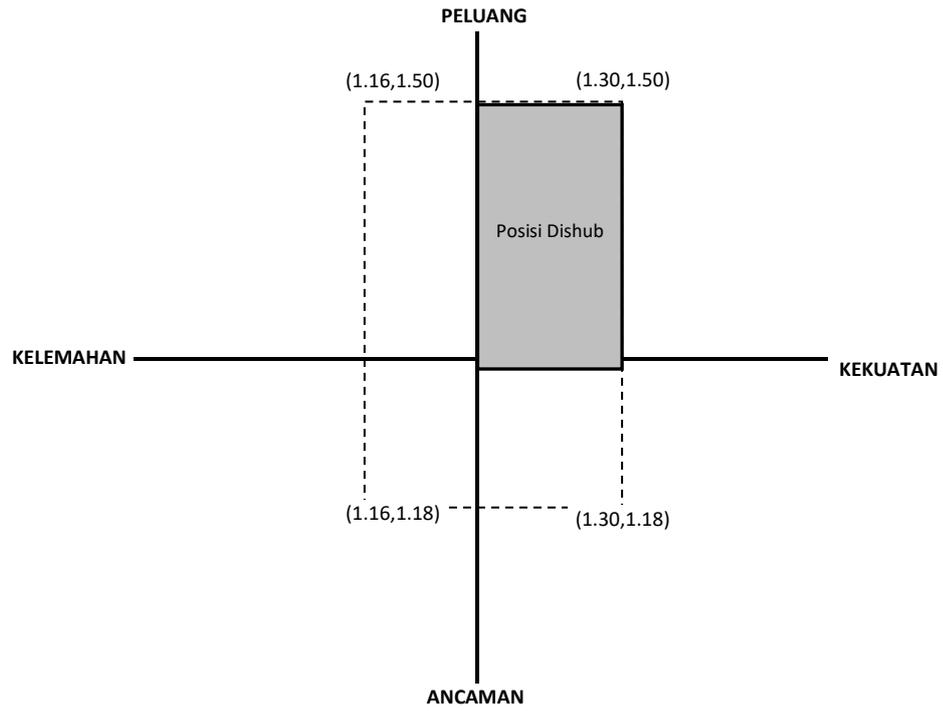
No.	Faktor Lingkungan	Bobot		Rating	Score	Prioritas
		Nilai	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)
I	INTERNAL					
	A. KEKUATAN					
1.	Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan citra dan kinerja organisasi Dinas Perhubungan	4	0,10	3	0,30	2
2.	Tersedianya SDM aparatur dengan jumlah yang cukup.	4	0,10	2	0,20	4
3.	Lokasi/ lahan Dinas Perhubungan yang sangat luas.	3	0,08	3	0,24	3
4.	Sarana dan prasarana yang memadai.	3	0,08	2	0,16	5
5.	Iklm dan suasana kerja yang kondusif.	4	0,10	4	0,40	1
	Sub Jumlah Kekuatan				1,30	
	B. KELEMAHAN					
1.	Sistem penilaian aparat yang belum memadai.	4	0,10	1	0,10	5
2.	Kemampuan teknis, substantif dan fungsional SDM aparatur Dinas Perhubungan relatif belum memadai.	4	0,10	4	0,40	1



3.	Masih adanya sikap aparatur yang memiliki tingkat disiplin dan etos kerja yang rendah.	4	0,10	3	0,30	2
4.	Sarana Gedung Kantor yang tidak memadai	4	0,10	2	0,20	4
5.	Dukungan dana yang relatif terbatas.	4	0,10	2	0,20	4
	Sub Jumlah Kelemahan				<u>1,16</u>	
	JUMLAH ALI	37	1,00			
No.	Faktor Lingkungan	Bobot		Rating	Score	Prioritas
		Nilai	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)x(5)	(7)
II	EKSTERNAL					
	A. PELUANG					
1.	Adanya program pendidikan dan pelatihan teknis, substantif dan fungsional.	3	0,10	2	0,20	4
2.	Posisi strategis Kabupaten Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas pusat kegiatan nasional yaitu Jakarta – Bandung – Cirebon.	4	0,13	4	0,52	1
3.	Tersedianya akses jalan Tol yang menghubungkan Purwakarta dengan daerah lain.	4	0,13	3	0,39	2
4.	Aksesibilitas jalan semakin meningkat dan bertambah baik sampai ke pelosok perdesaan.	4	0,13	2	0,26	3
5.	Adanya mitra kerja yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan	4	0,13	1	0,13	5
	Sub Jumlah Peluang				<u>1,50</u>	
	B. ANCAMAN					
1.	Perencanaan transportasi yang belum optimal menimbulkan kemacetan pada ruas-ruas jalan.	4	0,13	4	0,52	1
2.	Situasi dan kondisi ekonomi serta politik yang belum stabil.	3	0,10	4	0,40	2
3.	Pengaruh mengglobalnya Teknologi Informasi (IT).	4	0,13	2	0,26	3
	Sub Jumlah Ancaman				<u>1,18</u>	
	JUMLAH ALI	30	1,00			



Posisi Strategis Dinas Perhubungan



TABEL T,C 23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

No.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target RPJMD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -					
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	88%	77%	82%	97%	88%	88%	77%	82%	97%	
	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87%	72%	67%	82%	80%	87%	72%	67%	82%	80%	
2	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91%	0	100%	98%	99%	91%	0	100%	98%	99%	
	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	16%	0	83%	0	81%	16%	0	83%	0	81%	
3	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	85%	92%	32%	99%	96%	85%	92%	32%	99%	
6	Jumlah Trayek Angkutan Umum (Jumlah Trayek	48	48	48	49	49	50	50	50	50	50	50	50	1,04	1,04	102%	50	1
7	Jumlah Armada Angkutan Umum (Unit	1348	1348	1363	1363	1363	1378	1380	1400	1400	1400	1400	1400	1,02	103%	103%	103%	102%
8	Jumlah Terminal Dalam Kondisi Baik (Lokasi)	2	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	1	103%	1	103%	100%	
9	Lama waktu pengujian Kelayakan Kendaraan (KIR) (Menit	23	23	23	22	22	20	23	23	23	23	23	1	100%	105%	105%	1,15	
10	Jumlah Alat Uji Kelayakan Kendaraan (Unit	21	21	23	25	27	29	21	21	27	27	27	1	91%	1,08	1	100%	
11	Persentase Kecukupan Buku KIR Kendaraan (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	
12	Frekuensi Operasi Kelaikan Kendaraan Bermotor (Hari)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	1	100%	7%	1	100%	
13	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah (Unit)	997	997	1098	1245	1448	3466	96	166	83	159	42	10%	15%	7%	11%	1%	
14	Panjang Marka Jalan (M	2000	2000	2200	2400	2600	2800	6.759,00	12.011,52	2.406,30	26.372,20	1692,91	6,01	5,46	1,00	10,14	60%	
15	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas (Hari/Tahun)	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Basis Data Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Perhubungan (Jumlah Perangkat Lunak)	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	
17	Pedoman Bidang Perhubungan (Jumlah Perda, Perbup dan Keppub)	6	6	2	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	

TABEL T-C.24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	180.000.000	150.000.000	595.000.000			127.557.000	150.000.000	437.700.000							
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100.000.000	1.515.000.000	50.000.000			20.738.000	1.082.888.220	-							
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2.500.179.500	3.524.101.000	3.227.360.000			2.283.445.010	3.047.341.800	3.048.079.543							
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	2.024.110.000	525.000.000	470.000.000			1.707.133.725	386.811.575	261.712.705							
Program Pengembangan Nilai Budaya	8.485.000.000	4.835.000.000	9.830.000.000			7.706.775.000	12.852.377.000	5.744.040.000							
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	8.165.000.000	6.600.000.000	7.850.000.000			7.550.305.000	6.341.325.000	7.120.187.000							
Program Pengembangan Pemanfaatan Frekuensi Gelombang Radio	25.000.000	140.000.000	225.000.000			23.805.000	90.000.000	135.244.200							
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.250.000.000	8.200.000.000	25.296.100.000			1.065.007.500	3.535.785.510	8.529.695.510							
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	-	-	-	75.000.000	141.750.000	-	-	-	69.300.000	132.609.800	-	-	-	92	93,55
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-	100.000.000	424.600.000	-	-	-	51.000.000	414.400.000	-	-	-	51	97,60
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana TSDP	-	-	-	389.840.000	746.900.000	-	-	-	262.761.000	701.408.500	-	-	-	67	93,91
Program Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas	-	-	-	4.475.000.000	4.327.930.389	-	-	-	2.932.811.963	4.148.747.441	-	-	-	66	95,86
Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	-	-	-	4.475.000.000	4.327.930.389	-	-	-	2.932.811.963	4.148.747.441	-	-	-	66	95,86
Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	-	-	-	4.475.000.000	4.327.930.389	-	-	-	2.932.811.963	4.148.747.441	-	-	-	66	95,86
J U M L A H	22.729.289.500	25.489.101.000		13.989.840.000	14.297.041.167	20.484.766.235	27.486.529.105		9.181.496.889	13.694.660.623					



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang perhubungan. Untuk pencapaian kinerja pelayanan belum dapat sesuai dengan harapan yang disebabkan oleh permasalahan-permasalahan yang ada.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi adalah :

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA

KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		Permasalahan
		INTERNAL {Kewenangan OPD}	Eksternal (Kewenangan OPDLain)	
1	2	3	4	5
Jumlah SDM 274 orang	Kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian tertentu	Mengoptimalkan SDM yang ada	Pengaturan penempatan formasi aparatur merupakan kewenangan BKD	Kurangnya jumlah SDM dan terbatasnya SDM yang memiliki keahlian teknis
Sarana dan Prasarana : Gedung kantor, terminal, gedung Unit Pengujian kendaraan, Dermaga TSDP	Permenhub No. 132 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan KepMenhub No. 52 Tahun 2005 ttg Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan	Perencanaan kebutuhan sarana prasarana	Alokasi anggaran merupakan kewenangan BKAD	Kurangnya sarana dan prasarana Urusan Perhubungan
Ketersediaan rambu lalin 40%, ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan 72%	Disesuaikan kebutuhan yang seharusnya ada	Perencanaan kebutuhan sarana prasarana	Alokasi anggaran merupakan kewenangan BKAD	Kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan



Jumlah angkutan penumpang umum : 657 kendaraan				
Ratio kendaraan laik jalan 85,17 %, waktu pengujian kendaraan bermotor lama 57 menit				
Kasus pelanggaran lalu lintas 18.457 kasus				

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya (Self Evaluation). Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan kesekretariatan dan permasalahan yang ada di bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

1 Permasalahan di kesekretariatan

Permasalahan yang ada di lingkup ini adalah keterbatasan pegawai yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dan keterbatasan peralatan kerja. Hal ini sangat diperlukan guna akselerasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta kualitas kerja yang diharapkan.

2 Permasalahan Pada Bidang

Permasalahan yang ada pada bidang atau permasalahan yang terkait pada urusan wajib perhubungan meliputi beberapa aspek diantaranya sebagai berikut :



- 1) Aspek Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Identifikasi dilakukan terhadap gambaran pelayanan dan kinerja dalam melakukan tugasnya, pada periode sebelumnya.
- 2) Aspek Kajian terhadap RPJMD Provinsi Jawa Barat Identifikasi dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat
- 3) Aspek Kajian terhadap pola tata ruang Provinsi Jawa barat/RTRW Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.
- 4) Aspek Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS Analisis terhadap dokumen hasil KLHS

Ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan penilaian terhadap capaian/kondisi pada saat sekarang, analisa yang dilakukan meliputi kondisi pencapaian pada saat sekarang dibandingkan dengan rencana kerjanya, standar yang dipergunakan, faktor yang mempengaruhi dan permasalahan yang ada dalam pelayanan Dinas Perhubungan



Provinsi Jawa barat. Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
			Internal (Kewenangan Perangkat Daerah) Eksternal	Eksternal (Diluar Kewenangan Perangkat Daerah)	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana	1 Kualitas SDM Perhubungan 2 Sarana dan Prasarana 3 Kesadaran Masyarakat
Kajian terhadap RPJMD	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda	Keserasia, keterpaduan Sinkronisasi dan sinergitas
Kajian terhadap RTRW	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Perda, Prasarana yang ada	1 Kemacetan 2 Fasilitas Lalin 3 Jaringan Trayek
Kajian KHLS	Baik	Capaian Renstra	SDM dan Sarana	Peraturan Perundangan	Polusi Udara

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah., bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan Kepala Daerah, juga sebagaiantisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah dimasa mendatang, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah : ‘MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA’.

Adapun penjelasan dari Visi tersebut adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai nilai yang bersifat realitas, aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa **Misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

Pengertian dari Misi ini adalah dengan Peningkatan Kualitas sumber daya manusia sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan manusia seutuhnya dan masyarakat Purwakarta seluruhnya mencakup pembangunan pembangunan manusia, baik sebagai insan maupun sebagai sumber daya pembangunan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Misi 2 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik, Bersih dan Profesional



Pengertian dari Misi ini adalah Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintahan Daerah, Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah daerah Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan wilayah kita sendiri dan saling bersinerhgi dengan provinsi dan nasional.

Misi 3 :Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Pengertian dari Misi ini terwujudnya interkoneksi antara infrastruktur yang telah terbangun dengan masing masing kawasan dan wilayah dengan beberapa titik focus pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, peningkatan pengembangan konsep pembangunan perumahan permukiman kota ,pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan ,pean, kelembagaan, perbaikan kampung, peremajaan permukiman kota, pemugaran perumahan desa/rutilahu, penataan bangunan ,penyehatan lingkungan permukiman dan penyediaan pengelolaan air bersih secara merata di perkotaan dan pedesaan. Hasil tersebut akan diperoleh secara optimal apabila upaya pengembangan tersebut didukung oleh pembangunan prasarana yang memadai.

Misi 4 :Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang kokoh berbasisi Desa.

Pengertian dari Misi ini adalah Pembangunan perekonomian rakyat yang kokoh berbasisi perdesaan perlu dilakukan secara terpadu, dengan meningkatkan peran serta, pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat. nya. sesuai dengan amanat Undang-undang dimana pembangunan dimana pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Telaahan visi, misi, dan Tujuan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk



mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Terhadap Pencapaian Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
V	Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
M3	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan	Sinergitas perencanaan pembangunan antar perangkat daerah terkait masih belum optimal	Masih lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antar stakeholder	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
T1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sinergitas manajemen dan rekayasa lalu lintas belum berbanding lurus terhadap pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas	Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran masih terbatas	Teknologi dan kualitas sarana dan prasarana yang terus berkembang
S1	Meningkatnya Kapasitas dan	Sebaran sarana dan prasarana	Keterbatasan anggaran	Adanya forum perangkat



	Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	perhubungan belum merata dan memenuhi kebutuhan setiap wilayah/zona	perangkat daerah	daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
--	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------	-------------------------------------------------

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Renstra Provinsi Jawa Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi berkelanjutan. Dalam menjabarkan sasaran nasional, Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menerjemahkan beberapa sasaran menjadi beberapa bagian yang saling berkorelasi, dimana interkoneksi tersebut juga akan sejalan dengan sasaran pembangunan pada Unit Kerja Eselon I. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek, meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

1. Keselamatan dan Keamanan, meliputi sasaran :

1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi



2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi.

2. Pelayanan Transportasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan,
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan,
4. Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance,
5. Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan,
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dan
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan clean governance. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,

3 Kapasitas Transportasi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan menetapkan 5 (lima) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kapasitas sarana sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia; Meningkatnya layanan transportasi di daerah



- rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia;
4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dan;
 5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perhubungan Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PHB	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Aspek Keselamatan dan Keamanan Transportasi			
	Menurunnya angka kecelakaan transportasi	Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan berlalulintas	Masih rendahnya cakupan pelaksanaan sosialisasi keselamatan	Ketersediaan sumber daya manusia
	Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan; - Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima; - Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas 	Masih lemahnya koordinasi antar stake holer dan pemangku kepentingan	Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan
2.	Aspek pelayanan transportasi			



Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang - Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal; - Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih; - - Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai - Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik 	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas angkutan jalan dan RTRW
Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai den	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Regulasi penerimaan CPNS/PNS	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan	Masih terbatasnya kajian terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Kebijakan dapat melibatkan jasa konsultan
Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good governance	Masih rendahnya tingkat kinerja aparatur perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan Masih	Masih rendahnya penetapan regulasi/kebijakan bidang perhubungan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan	Masih adanya titik lokasi berpotensi rawan kemacetan	Terdapatnya ruas jalan yang masih	Adanya forum lalu lintas dan



	meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi	yang akan menyebabkan polusi udara dari emisi gas buang kendaraan	dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	angkutan jalan
	Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean governance	Masih rendahnya kualitas pengawasan dalam mewujudkan clean governance	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi	Anjab pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan pegawai
3.	Aspek kapasitas transportasi			
	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda	Masih lemahnya keterpaduan sistem transportasi antar moda	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
	Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;	-	-	-
	Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia	-	-	-
	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	Dukungan struktur ruang kota yang kurang memadai	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
	Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi	Masih belum optimalnya penerapan teknologi informasi lalu lintas dan angkutan jalan	Keterbatasan anggaran	Jaringan FO untuk akses internet tersedia

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Dimana dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu tahap Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Visi Gubernur Jawa Barat terpilih Tahun 2018-2023 adalah: "**TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI**"

Dalam mewujudkan Visi tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan fungsinya tercantum dalam Misi yang ke 3 (tiga), Tujuan ke 1 (satu) dan Sasaran ke 2 (dua) .

MISI KE 3 (tiga) : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.		
Tujuan 1 (satu)	Sasaran ke 2 (dua)	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran
Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas Transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	a. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah (persen) b. Peningkatan Arus Barang dan Penumpang Antar Wilayah (%)

Telaahan sasaran dalam renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 sebagaimana tersebut di atas, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Sarana dan prasarana lalu lintas belum optimal	Keterbatasan anggaran	Dokumen Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan RTRW
2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem jaringan infrastruktur transportasi	Masih lemahnya keterpaduan sistem transportasi antar moda Keterbatasan	Keterbatasan anggaran	Adanya forum lalu lintas dan angkutan jalan
3	Mengembangkan sistem jaringan transportasi massal yang handal dan modern	Dukungan struktur ruang kota yang kurang memadai	Keterbatasan kewenangan	Keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi dan kompetensi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kondisi Lingkungan Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2031.

- a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :



- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- 4) Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:
 - 5) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - 6) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - 7) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - 8) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 9) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 10) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 11) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 12) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 13) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional



Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Purwakarta, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Maka Tujuan Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan”

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten Pusat pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang terpadu, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan adalah

Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis, salah satu strategi Penataan ruang sebagaimana tercantum dalam pasal 5 (lima) angka 4 (empat) adalah Pengembangan sistem pelayanan dan permukiman secara berhierarki, didukung infrastruktur wilayah terpadu, serta bersinergi dengan sistem perkotaan dan kawasan strategis dengan salah satu strateginya yaitu mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan secara terpadu;

Dalam Bab IV pasal 6 Peraturan Daerah No 11 Tahun 2012 tentang RTRW disebutkan Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas :

- a sistem pusat kegiatan; dan
- b sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa sistem jaringan transportasi terdiri atas:

- a. sistem jaringan transportasi darat;



- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP).

Arah Kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat yang berkaitan langsung dengan Urusan Perhubungan dapat dilihat dalam Tabel 3.5 Lampiran :

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis/KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah sebagai berikut

Tabel 3.6

Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Nama	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong



	Program yang Memberikan Dampak Lingkungan			
	Program Pelayanan Lalu Lintas	Masih adanya ruas jalan yang dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas yang berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan	Masih adanya ruas jalan yang dipergunakan selain untuk kepentingan lalu lintas	Forum Lalu Lintas dan Angkuta Jalan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
	Program Pelayanan Angkutan	Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji emisi gas buang	Masih rendahnya kepedulian pemilik/awak angkutan umum terhadap dampak emisi gas buang kendaraan	Ketersediaan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor dan perlengkapan pengujian kendaraan bermotor (uji emisi gas buang)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, isu strategis adalah kondisi/ hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah. Kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan



kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi/ hal bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Berdasarkan faktor-faktor dari pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, jika ditinjau dari aspek: gambaran pelayanan prangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa barat, maka isu-isu strategis yang ada adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan dan berdampak terhadap polusi udara dan kebisingan kendaraan;
3. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan angkutan kendaraan umum berbasis aplikasi;
4. Jaringan trayek angkutan jalan masih terdapat tumpang tindih;
5. Masih adanya kawasan yang belum terlayannya trayek angkutan perbatasan;
6. Belum tersedianya terminal tipe c;
7. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
8. Masih adanya kendaraan angkutan umum yang tidak lulus uji;
9. Masih lambatnya penanganan kebutuhan dan/atau pengaduan masyarakat terhadap perlengkapan jalan



padaruas jalan nasional dan/atau provinsi yang berada di wilayah Provinsi Jawa barat.

Berbagai isu strategis tersebut, bila dianalisis dan ditelaah lebih lanjut mengerucut pada 2 isu strategis utama yakni :

1. Kesenjangan yang makin besar antara perkembangan kebutuhan dan aktivitas masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang tersedia;
2. Manajemen rekayasa lalu lintas, manajemen angkutan dan pengendalian lalu lintas belum optimal.







BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Perhubungan yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018–2023 yang menjadi tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan kebijakan teknis Urusan Bidang Perhubungan.

4.1 TUJUAN

Tujuan dalam Rencana Strategis adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah. Pernyataan Tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan Tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Rumusan Tujuan ini harus realistis dan dapat dicapai.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam pembangunan maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah Mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Kelancaran dan Ketertiban lalu lintas.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (Outcome) Program Perangkat Daerah. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah atau Kelompok Sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan Indikator Kinerja.

Langkah-Langkah Perumusan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah terdiri atas :



1. Menelaah Pernyataan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja Dalam Rancangan Awal RPJMD;
2. Menelaah Pernyataan Tujuan Renstra Perangkat Daerah yang Telah Dibuat;
3. Merumuskan Pernyataan Sasaran untuk Masing- Masing Tujuan;
4. Merumuskan Rancangan Indikator Kinerja Sasaran (Impact) dan Target Indikator yang Terukur dari setiap Sasaran;
5. Merumuskan Kembali Konsistensi Pernyataan Sasaran terhadap Tujuan dan Melakukan Penyempurnaan Bila Diperlukan.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran;
2. Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas layanan publik dan sarana prasarana transportasi;
3. Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan ;
4. Meningkatnya keselamatan berlalu lintas

Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dari aspek perencanaan melalui 3 (Tiga) Indikator, yaitu :

1. Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran;
2. Peningkatan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan darat;
3. Prosentase konektivitas Angkutan Sungai dan Penyebrangan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 terlampir





Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
 Tahun 2018 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan modern	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	persen	75	75	76	77	78	79	79
			Presentase Aplikasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	persen	88	98	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan ketertiban, keamanan kelancaran dan keselamatan transportasi	Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas layanan publik dan sarana prasarana transportasi	Presentase Kepemilikina KIR Angkutan Umum	%	82.8%	83%	85%	88%	90%	91%	91%

Perubahan Renstra



		Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan	%	52.13%	52.14%	50,30%	49.42%	48.30%	47.18%	47.18%
		Jumlah Dokumen Lalu lintas	Jml	2	3	4	4	5	5	5
	Meningkatnya sarana, prasarana transportasi	Jumlah Pemasangan Rambu rambu	Jml	574	574	590	590	600	600	625
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Jml	3	3	4	4	5	5	5
		Jumlah Sararana dan Prasarana TSDP	Jml	1	3	4	4	5	5	5
	Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	Prosentase Kendaraan Umum /barang yang tidak laik jalan	%	17,2%	17,2%	15%	12%	10%	9%	9%
		Frekuensi Operasi Kadar	Jml	12	28	28	28	28	28	28

Perubahan Renstra



			Emisi Gas Buang Yang Lewat Batas																
			Basis ata Lalu intas dan Sarana Prasarana Perhubungan (Jumlah Perangkat Lunak)	Jml	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5





Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah :

Misi ke-3 yaitu “ Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan”

- **Tujuan Kesatu yaitu** :Menyediakan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Memadai.
- **Sasaran ke Empat yaitu** : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Percepatan Pengembangan Wilayah
- **Srategi Pertama yaitu** : Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
- **Arah Kebijakan yaitu** : Peningkatan Infrastruktur bagi Pengembangan Ekonomi dan Playanan Dasar.



Dalam upaya mewujudkan misi sebagaimana dimaksud di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan untuk lima tahun kedepan dapat dilihat dalam Tabel 4.1 :





Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 -2023



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018 -2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan modern	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	persen	75	75	76	77	78	79	79
			Presentase Aplikasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan	persen	88	98	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan ketertiban,keamanan kelancaran dan keselamatan transportasi	Tingkat Pemenuhan Aksessibilitas layanan publik dan sarana prasarana transportasi	Presentase Kepemilikina KIR Angkutan Umum	%	82.8%	83%	85%	88%	90%	91%	91%
			Rasio Panjang Jalan perjumlah kendaraan	%	52.13%	52.14%	50,30%	49.42%	48.30%	47.18%	47.18%

Perubahan Renstra



		Jumlah Dokumen Lalu lintas	Jml	2	3	4	4	5	5	5
	Meningkatnya sarana, prasarana transportasi	Jumlah Pemasangan Rambu rambu	Jml	574	574	590	590	600	600	625
		Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Jml	3	3	4	4	5	5	5
		Jumlah Sararana dan Prasarana TSDP	Jml	1	3	4	4	5	5	5
	Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	Prosentase Kendaraan Umum /barang yang tidak laik jalan	%	17,2%	17,2%	15%	12%	10%	9%	9%
		Frekuensi Operasi Kadar Emisi Gas Buang Yang Lewat Batas	Jml	12	28	28	28	28	28	28

Perubahan Renstra



		Basis ata Lalu intas dan Sarana Prasarana Perhubungan (Jumlah Perangkat Lunak)	Jml	1	1	1	1	1	1	5
		Pedoman Bidang Perhubungan (Jumlah Perda,Perbup dan Kepbup)	Jml	0	1	1	1	1	1	5
	Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jml	4	4	4	4	5	5	5









BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Perumusan strategi dan kebijakan bertujuan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi organisasi instansi Pemerintah.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi, dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi untuk menjabarkannya kedalam tindakan-tindakan yang realistis dan relevan.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen perkantoran.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.
3. Meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi.

Dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan, Dinas Perhubungan menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Pemenuhan dukungan manajemen perkantoran yang ideal.
2. Pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan.
3. Pemenuhan ketertiban, kelancaran dan keselamatan transportasi.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai sasaran tertentu. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan.

Berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta melaksanakan 3(tiga) Program yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa kegiatan beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan ;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan ;
 - 1) Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah



- 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LIAJ))

Program ini terdiri dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

- 1 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, dengan Sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan :



- 1) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 3 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan sub Kegiatan :
- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - 2) Pembangunan Gedung Terminal
 - 3) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- 4 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan sub kegiatan :
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor



- 3) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 5) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan ;
 - 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 7 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
 - 2) Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
- 8 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - 2) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - 4) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - 5) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum



- 9 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan ;
 - 1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 11 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan
 - 1) Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota
- 12 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
 - 1) Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik



- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

3)

C. Program Pengelolaan Pelayaran

Program pengelolaan Pelayaran etrdidi dari kegiatn dan sub kegiatan diantaranya :

- 1 Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha. dengan sub kegiatan :

- 1) Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- 2 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 2) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 3 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. dengan sub kegiatan :

- 1) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP, 2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja (performance indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun kedepan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi indikator capaian setiap tahunnya.

Indikator kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dapat dilihat pada Tabel T-C.28.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 telah disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pandemik Covid-19 yang telah memberikan dampak terhadap kesehatan, sosial masyarakat dan perekonomian daerah termasuk DI Kabupaten Purwakarta, hal ini mengakibatkan capaian target pembangunan daerah tidak dapat tercapai secara optimal. Kebijakan Nasional dan Daerah terkait penanganan pandemik Covid-19 dan upaya pemulihannya, termasuk penyesuaian target capaian pembangunan daerah dan program pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta penyesuaian kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah diterapkan kedalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta 2018-2020 ini.

Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, serta mengerahkan semua potensi dan kemampuan daerah guna tercapainya kinerja pembangunan daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, serta merupakan dokumen yang



harus dipedomani oleh Dinas Perhubungan dalam menyusun dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2018-2023.

Keberhasilan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu dokumen Perubahan Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan kerja bagi seluruh jajaran pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta dalam rangka mensukseskan Visi Kabupaten Purwakarta yaitu “Mewujudkan Purwakarta Istimewa“. Akhirnya semoga Perubahan Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Purwakarta, 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA**



R.IWAN SOEROSO SOEDIRO,ST
NIP. 19720228 200312 1 003

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB VIII PENUTUP

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PERHUBUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

KATA PENGANTAR

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

LAMPIRAN LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Veteran No. 1 Telp./ Fax. (0264) 200105 Purwakarta 41118

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR :

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2018 – 2023**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian negara/Lembaga (LNRI Tahun 2004 Nomor 75, TLNRI Nomor 4406);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 78, LNRI Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta.
23. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 111 Tahun 2020 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023.
- KEDUA** : Sistematika Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023, terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP

- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 bersifat mengikat dalam penetapan kebijakan dan program.
- KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019–2023 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purwakarta
Pada tanggal : 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWAKARTA

R.IWAN SOEROSO SOEDIRO,ST
NIP. 19720228 200312 1 003

Tabel C-27
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan Manajemen Perkantoran secara optimal				Tingkat Pemenuhn Dukungan Manajemen Perkantorn														Dishub	Pwk
Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran		2.09.2.09.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantorn	1 Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi			6.535.300.000		7.175.960.000		8.710.960.000		8.650.960.000		8.500.960.000		39.574.140.000		
				Tingkat pemenuhn kebutuhan rumah tangga dan sarana/pras arana kantor															
				2															
				3 Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik															
				4 Persentase unit kerja yang mendapatkn pelayanan administrasi perkantorn															

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				5 Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan perundang - undangan															
				6 Persentase ketersediaan data kinerja OPD															
			1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatny pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	100.000.000	1	104.880.000,00	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	654.880.000	Dishub	Pwk
			2 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kualitas Lingkungan Kantor	-	1	39.000.000	1	41.400.000,00	1	41.400.000,00	1	41.400.000,00	1	41.400.000,00	1	204.600.000	Dishub	Pwk
			3 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatny Pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	125.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Dishub	Pwk
			4 Penyediaan barang cetakan dan penggandn	Meningkatnya Pelayan Admiistrasi Perkantorn	-	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	700.000.000	Dishub	Pwk
			5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	33.240.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	208.240.000	Dishub	Pwk
			6 Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpnuhiny Kebutuhan Rumah Tangga Kantor	-	1	25.000.000	1	50.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	375.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat,tamu dan pegawai	-	1	75.000.000	1	40.000.000,00	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	415.000.000	Dishub	Pwk
			8 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Meningkatnya Koordinasi antar OPD	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	550.000.000	Dishub	Pwk
			9 Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terpenuhinya Jasa Tenaga PTT	-	1	535.560.000	1	629.560.000	1	629.560.000	1	629.560.000	1	629.560.000	1	3.053.800.000	Dishub	Pwk
			10 Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya kualitas keamanan Kantor	-	1	39.000.000	1	41.400.000	1	41.400.000	1	41.400.000	1	41.400.000	1	204.600.000	Dishub	Pwk
			11 Penyediaan Jasa Tenaga Harian Lepas (THL)	Meningkatnya Pelayanan Bidang Perhubungan	-	1	3.952.500.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000	1	4.300.000.000	1	21.152.500.000	Dishub	Pwk
			12 Festival Purwakarta Istimewa	Terselenggaranya Festival Purwakarta Istimewa	-	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	225.000.000	Dishub	Pwk
			13 Peringatan Hari Jadi Perhubungan	Terselenggaranya Peringatan Hari jadi Perhubungan	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Dishub	Pwk
			14 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	650.000.000	Dishub	Pwk
			15 Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya Peralatan Gd Kantor	-	1	80.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000	1	405.000.000	Dishub	Pwk
			16 Pengadaan Mebeulair Kantor	Terpenuhinya kebutuhan mebelair kantor	-		-	1	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	600.000.000	Dishub	Pwk
			17 Implacment Halaman Gedung Kantor	Terpenuhinya Implacment gd Kantor	-		-			1	200.000.000	1		1	300.000.000	1	500.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			18 Pengadaan Mobil Uji Keliiling	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	-	-	-	1	800.000.000							1	800.000.000	Dishub	Pwk
			19 Pengadaan Kendaraan Oprasional Roda 4 PATWAL/PKB	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantorn	-	1	560.000.000			1	510.000.000		500.000.000			2	1.570.000.000	Dishub	Pwk
			20 Pengadaan Kendaraan Oprasional Pejabat Eselon IV dan Operasioanal Dalwas	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	6	150.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	6	200.000.000	24	750.000.000	Dishub	Pwk
			21 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kualitas Gedung Kantor	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	450.000.000	Dishub	Pwk
			22 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bertambahnya Masa Pakai Kendaraan Operasional	-	1	141.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	691.000.000	Dishub	Pwk
			23 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bertambahnya Masa Pakai Perlengkapan Gd Kantor	-	1	25.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	375.000.000	Dishub	Pwk
			24 Pengadaan Tenda Posko Pengamanan	Terpenuhinya Sarana Tenda PAM	-			-		1	100.000.000				100.000.000	8	200.000.000	Dishub	Pwk
			25 Penambahan Gd UPTD Parkir	Terpenuhinya kebutuhan gd Kantor UPTD	-					1	50.000.000					1	50.000.000	Dishub	Pwk
			26 Penambahan Ruang Kasi Angkutan	Terpenuhinya kebutuhan ruang kasi Angkutan	-							1	100.000.000			1	100.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			27 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya Kualitas Displin Pegawai Dishub	-	118	200.000.000	289	175.000.000	289	200.000.000	289	200.000.000	289	200.000.000	289	975.000.000	Dishub	Pwk
			28 Pengadaan Pakaian Hari hari Tertentu	Terpenuhinya kebutuhan pakain batik dishub	-		-	289	150.000.000							289	150.000.000	Dishub	Pwk
			29 Pengadaan Baju Olah Raga	Meningkatnya Kualitas Displin Pegawai Dishub	-		-	-	-	289	150.000.000			289	150.000.000	289	300.000.000	Dishub	Pwk
			30 Diklat PKB	Meningkatnya SDM Perhubungan	-			-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Dishub	Pwk
			31 Diklat PPNS	Terpenuhinya Kebutuhan PPNS	-	-	-	-	-	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	9	300.000.000	Dishub	Pwk
			32 Diklat Andar Lalin	Terpenuhina pegawai yang memiliki kualitas Amdal Lalina	-			-	-	-		1	100.000.000	1		1	100.000.000	Dishub	Pwk
			33 Diklat Pengendalian dan Pengawasan Lalin	Meningkatnya Kualitas Petugas Dalwas	-			-	-	-		1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			34 Diklat Struktural	Terpenuhinya Sarat Jabatan Struktural	-			-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		300.000.000	Dishub	Pwk
			35 Diklat ASDP	Meningkatnya Kualitas Petugas ASDP	-			-	-	-		-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	Dishub	Pwk
			36 Peningkatan Kapasitas Pegawai Dinas Perhubungan	Meningkatnya Kapasitas pegawai dinas perhubungan	-	1 pkt	100.000.000			1 pkt	200.000.000	1 pkt	200.000.000	1 pkt	200.000.000	1 pkt	700.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			37 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	37.500.000	Dishub	Pwk
			38 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 (Dok)	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	25.000.000	1 (Dok)	125.000.000	Dishub	Pwk
			39 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Penyusunan Barang Milik Daerah	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	37.500.000	Dishub	Pwk
			40 Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Rencana Kerja SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	37.500.000	Dishub	Pwk
			41 Penyusunan LPPD	Tersedianya Data LPPD	1 (Dok)	1 (Dok)		1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	7.500.000	1 (Dok)	30.000.000	Dishub	Pwk
			42 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	7.500.000			-	-	-	-	-	-	-	7.500.000	Dishub	Pwk
			43 Survey Peningkatan PAD	Tercapainya Kegiatan Survey Peningkatan PAD	-		-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		350.000.000	Dishub	Pwk
Mewujudkan Ketertiban, keamanan dan keselamatan, transportasi				Tingkat Pemenuhan Aksesibilitas layanan publik dan sarana prasarana transportasi												1		Dishub	Pwk
Meningkatnya sarana, prasarana transportasi		2.09.2.09.01.1	Program pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum			890.000.000		925.000.000		6.950.000.000		7.350.000.000		7.500.000.000		23.615.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			1 Pembangunan Terminal Tipe C di Kabupaten Purwakarta	Jumlah Terminal Tipe C di Kabupaten purwakarta, tersedia	-			-		1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	4	7.500.000.000	Dishub	Pwk
			2 Pembangunan Shelter Penumpang Angkutan Umum	Tersedianya Shelter Penumpang Angkutan Umum	-			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	Dishub	Pwk
			3 Study Kelayakan Pembangunan Terminal	Tersedianya Terminal yang layak	-	1	50.000.000			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		350.000.000	Dishub	Pwk
			4 DED Rencana Pembangunan terminal Tipe C	Terwujudnya DED Rencana Pembangunan Terminal	-			1		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	600.000.000	Dishub	Pwk
			5 Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu LLAJ Tersedia	-	1	245.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	1.645.000.000	Dishub	Pwk
			6 Pengadaan Repeater Komunikasi Radio Pelayaran	Tersedianya Repeater Komunikasi Radio Pelayaran	-			1			150.000.000	1		1	50.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			7 Pengadaan CCTV di Kawasan Tertib Lalu Lintas	Tersedianya CCTV di Kawasan Tertib Lalu Lintas	-			1		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Dishub	Pwk
			8 Pengadaan Running Text	Jumlah Runing Text Tersedia	-			1	50.000.000	1		1	50.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			9 Pengadaan Traffic Corn dan Barrier Beton	Jumlah Trapicon dan barrier beton Tersedia	-	1	200.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	1.500.000.000	Dishub	Pwk
			10 Pengadaan Barier Parkir	Tersedianya Barier Parkir	1	1	220.000.000	1		1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	5	970.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			11 Pengadaan Marka Jalan, Zebra Cross dan Marka Parkir Tersedia	Panjang Marka Jalan	53.137	53.137	100.000.000	53.637	200.000.000	54.137	1.000.000.000	54.637	1.500.000.000	55.137	1.500.000.000	55.137	4.300.000.000	Dishub	Pwk
			12 Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya Rambu2 Lalin dalam kondisi baik	-	1	-	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	275.000.000	Dishub	Pwk
			13 Perawatan dan Perbaikan Trafik Light dan Warning Light	Berfungsinya Trafik Light dan Warning Light dengan baik	-	1	-	1	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	300.000.000	Dishub	Pwk
			14 Pemeliharaan Terminal	Tersedianya Terminal yang bersih dan nyaman	-	1	50.000.000	1	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	500.000.000	Dishub	Pwk
			15 Pemeliharaan Repeater Komunikasi	Komunikasi Berjalan Lancar	-		-		50.000.000				50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dishub	Pwk
			16 Tersedianya Pelabuhan/dermaga di Kabupaten Purwakarta	Tersedianya Pelabuhan/dermaga di Kabupaten Purwakarta	-			1	-	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	1	3.000.000.000	Dishub	Pwk
			17 Pengadaan Rambu LLASDP Tersedia	Tersedianya Rambu LLASDP	-		-		-		100.000.000		100.000.000		100.000.000		300.000.000	Dishub	Pwk
			18 Pengadaan Perlengkapn Keselamatann Penybrangn	Tersediany Alat Pengaman Life Jacket dan Ring Buoy Tersedia	-		-		-		75.000.000		75.000.000		75.000.000		225.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			19 Inventarisasi Angkutan ASDP di Kabupaten Purwakarta	Terpenuhinya Kebutuhan Data ASP	-		-		25.000.000		50.000.000		-		50.000.000		125.000.000	Dishub	Pwk
			20 PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru LLASD	Terwujudnya keselamatan TSDP	-		25.000.000		50.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		375.000.000	Dishub	Pwk
	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pelayanan perhubungan	2.09.2.09.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR	-		950.000.000		950.000.000		1.655.000.000		950.000.000		1.870.000.000		6.375.000.000	Dishub	Pwk
			1 Kegiatan Pengadaan Alat Uji Penunjuk Kecepatan (Speedometer tester)	Tersedianya Alat Uji Speedometer (Penunjuk Kecepatan)	-	1	600.000.000									1	600.000.000	Dishub	Pwk
			2 Pengadaan perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor (Kartu, sertifikat dan stiker)	Tersedianya Kartu uji, sertifikat uji, stiker tanda lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor dan stiker tanda samping	-	1	100.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.200.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor dan terciptanya keakurasian hasil uji	2	9	200.000.000	9	100.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	200.000.000	9	900.000.000	Dishub	Pwk
			4 Kegiatan Pengadaan Alat Uji Smoke Tester	Tersedianya Alat Uji Smoke Tester	2									1	120.000.000	2	120.000.000	Dishub	Pwk
			5 Pengadaan Alat Uji Gas Analyzer Tester	Tersedianya Alat Uji Gas Analyzer tester	2			1						1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk
			6 Pengadaan Alat Rem Portabel (Portable brake tester)	Tersedianya Aalat Uji Rem Potable	1			1						1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk
			7 Generator Set 60 KVA Silent	Tersedianya Generator Set 60 KVA Silent	1					1	385.000.000					1	385.000.000	Dishub	Pwk
			8 Pengadaan Alat Ukur Dimensi (Measuring Tape)	Tersedianya Alat Ukur Dimensi (Measuring Tape)	1			1						1	600.000.000	1	600.000.000	Dishub	Pwk
			9 Pengadaan Alat Uji Kebisingan (Noise tester)	Tersedianya Alat Uji Kebisingan (Noise tester)	2			1						1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk
			10 Pengadaan Alat Uji Kepekatan Kaca (Tint tester)	Kegiatan Pengadaan Alat Uji Kepekatan Kaca (Tint tester)	2			1						1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			11 Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	400.000.000	Dishub	Pwk
			12 Pengadaan alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)	Tersedianya alat Uji Lampu Utama (Headlight Tester)		1				1	270.000.000					1	270.000.000	Dishub	Pwk
			13 Pengadaan Alat Bantu Pemeriksaan Visual Bagian Bawah Kendaraan (Joint Play Detector)	Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Pemeriksaan Visual Bagian Bawah Kendaraan (Joint Play Detector)	-			1	-			1	200.000.000	1		1	200.000.000	Dishub	Pwk
			14 Peningkatan Kapasitas Pegawai Pengujian Kendaraan Bermotor	Kemampuan Teknik Penguji Kendaraan Bermotor		-	-	-	-	1	50.000.000		50.000.000		100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			17 Pengadaan Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor		1		-				1	100.000.000			2	100.000.000	Dishub	Pwk
			18 Rehab Gedung Unit Pengujian	Tersedianya Gedung Unit Pengujian yang baik		1		-	-	1	300.000.000			1		1	300.000.000	Dishub	Pwk
			19 Pemeliharaan Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor	Tersedianya Alat Uji Emisi Gas Buangan dan Kebisingan Kendaraan Bermotor		1				1	50.000.000	1		1	50.000.000	1	100.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
			20	Pengadaan Alat Uji Kuncup Roda Depan	Tersedianya Alat Uji kuncup Roda depan	-	-	1	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	Dishub	Pwk	
		2.09.2.09.01.23	Program peningkatan pelayanan lalu lintas angkutan jalan	Persentase Layanan Angkutan Darat			75.000.000		125.000.000		500.000.000		350.000.000		500.000.000		1.550.000.000	Dishub	Pwk	
			1	Pengadaan Papan Jurusan Angkutan Penumpang Umum	Tersedianya branding Purwakarta Istimewa pada Angkutan Penumpang Umum	-	1	25.000.000	1	-	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000	1	175.000.000	Dishub	Pwk	
			2	Pembinaan Para Pengusaha Jasa Angkutan Umum dan Angkutan Karyawan	Meningkatnya Wawasan Para Pengusaha Angkutan umum dan Angkutan karyawan	-	-	25.000.000	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk	
			3	Study Kelayakan Jaringan Trayek Angkutan Penumpang Umum	Terpenuhi Angkutan Perintis Penumpang umum di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	1	-	-	1	100.000.000			1	100.000.000	Dishub	Pwk	
			4	Branding Angkutan Penumpang Umum	Tersedianya informasi Jurusan Angkutan Penumpang Umum	-	-	-	1	50.000.000	1	150.000.000	-	-	1	150.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk
			5	Pembuatan/ Penyusunan Data Base (Sistem Informasi Manajemen/ SIM- Angkutan Barang)	Tersedianya data angkutan barang di Kabupaten Purwakarta	-	-	-	25.000.000	1	100.000.000	-	-	1	100.000.000	1	225.000.000	Dishub	Pwk	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			6 Pembinaan dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT)	Terpilainya Awak Angkutan Umum Teladan se Kabupaten Purwakarta	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	350.000.000	Dishub	Pwk
				Jumlah Dokumen Lalu lintas			50.000.000		125.000.000		650.000.000		500.000.000		750.000.000		2.075.000.000	Dishub	Pwk
			1 Survey kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Dokumen Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan	-	1	25.000.000	-	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	325.000.000	Dishub	Pwk
			2 Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu Lintas (Hari/Tahun)	-			-	-	1		1	100.000.000	1		4	100.000.000	Dishub	Pwk
			3 survey identifikasi perlintas sebidang antara jalan dan rel kereta api	Jumlah Dokumen Perlintasan Sebidang antara Jalan dan Rel Kereta Api	-			-	-	1	100.000.000	1		1	100.000.000	1	200.000.000	Dishub	Pwk
			4 Survey identifikasi lintasan penyebrangan	Jumlah Dokumen Lintasan Penyebrangan	-			-	-	1		1		1	100.000.000	1	100.000.000	Dishub	Pwk
			5 Survey Perhitungan Pola Arus Lalu lintas Harian	Jumlah Dokumen Lintasan Harian Rata-rata	-	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	225.000.000	Dishub	Pwk
			6 Survey perhitungan arus membelok dipersimpangan (Turning Movement)	Jumlah Dokumen Arus Membelok dipersimpangan (Turning Movement)	-			1	25.000.000	1		1	50.000.000	1		2	75.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			7 Survey rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan lalu Lintas dan angkutan jalan Kabupaten	-			-	-	1	100.000.000			1	100.000.000	2	200.000.000	Dishub	Pwk
			8 Survey identifikasi jalan sistem satu arah (SSA)	Jumlah Dokumen Sistem Jalan Satu Arah	-	-	-	-	-					1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk
			9 survey study penetapan jaringan angkutan barang pada jalan Kabupaten	Jumlah Dokumen Jaringan Angkutan Barang pada Jalan Kabupaten	-			-	-			5 (dok)	100.000.000				100.000.000	Dishub	Pwk
			10 Survey pembangunan area traffic control sistem wilayah perkotaan purwakarta	Jumlah Dokumen Area TrafficControl Sistem wilayah perkotaan purwakarta	-	-	-	-	-	1	100.000.000						100.000.000	Dishub	Pwk
			11 Survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta	Survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta	-			-	-					1	100.000.000	2	100.000.000	Dishub	Pwk
			12 Survey study pembangunan angkutan massal di wilayah perkotaan purwakarta	Jumlah Dokumen Jalur Sepeda di wilayah Perkotaan Purwakarta						1	100.000.000						100.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			13 Penilaian WTN (Wahana Tata Nugraha)	Terlaksananya Penilaian WTN	-	-		-	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	350.000.000	Dishub	Pwk
	Meningkatnya kepatuhan pemilik angkutan terhadap syarat laik kendaraan	2.09.2.09.01.25	Program pengembangan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan			1.900.000.000		2.325.000.000		2.480.000.000		2.480.000.000		2.480.000.000		11.665.000.000	Dishub	Pwk
			1 Penyelenggaraan Forum LLAJ	Tersusun Perencanaan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan	-	6	50.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	125.000.000	12	550.000.000	Dishub	Pwk
			2 Pemeriksaan dan Penertiban Kendaraan Bermotor	Data dan Jumlah Tilangan Kendaraan Penumpang orang/Barang		24	150.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	50.000.000	24	350.000.000	Dishub	Pwk
			3 Pengendalian dan Pengawasan Lalu lintas	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan		24	175.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	400.000.000	24	1.775.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			4 Pengendalian dan Pengawasan Rangkaian Hari Jadi Kabupaten Purwakarta	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan		-	-	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		350.000.000	Dishub	Pwk
			5 PAM Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru	Meningkatnya keterampilan petugas		2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	7.500.000.000	Dishub	Pwk
			6 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	Terpilinya Perwakilan kab.Purwakarata ke Tk.Prov		-	-	1	25.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	325.000.000	Dishub	Pwk
			7 Pengadaan Alat Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan	Tersedianya Alat uji Emisi				1	100.000.000	1		1		1			100.000.000	Dishub	Pwk
			8 Survey titik frekuensi tinggi kegiatan bongkar muat	Tersedianya Data Survey Titik Tinggi Bongkar Muat		-	25.000.000	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk
			9 Survey inventarisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang	data inventarisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang		-		1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		175.000.000	Dishub	Pwk
			10 Pengukur emisi gas buang kendaraan non angkutan umum/baran g	Meningkatnya persyaratan teknis dan laik Kendaraan Bermotor secara visual/alat		-		-		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		150.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			11 Stikerisasi mesin-mesin non transportasi penghasil emisi gas buang	Meningkatnya persyaratan teknis dan laik Kendaraan Bermotor secara visual/alat		-		1	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000		90.000.000	Dishub	Pwk
			12 Penyelenggaraan Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor di Terminal, Pool dan tempat lain	Terselenggaranya Uji Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor di Terminal, Pool dan tempat lain		-		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		200.000.000	Dishub	Pwk
		2.09.2.09.01.26	Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan angkutan umum tidak dalam trayek	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dikembangkan			85.000.000		150.000.000		575.000.000		650.000.000		225.000.000		1.685.000.000	Dishub	Pwk
			1 Pembinaan dan pengawasan angkutan tidak dalam trayek	Data-data Inventarisasi Pengusahaan Angutan			10.000.000	1	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		110.000.000	Dishub	Pwk
			2 Inventarisasi angkutan kendaraan tidak dalam trayek dan Pemaduan Moda	Data-data Inventarisasi Pengusahaan Angutan					25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			3 Stikerisasi Angkutan Tidak dalam trayek	Meningkatnya keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan		-	-	-			25.000.000				25.000.000		50.000.000	Dishub	Pwk
			4 Pembuatan Aplikasi Pengawasan dan pengendalian lalu lintas layanan CCTV dan Android	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-	-		50.000.000								50.000.000	Dishub	Pwk
			5 Kajian pembangunan Museum Lalulintas	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-					-		100.000.000				100.000.000	Dishub	Pwk
			6 Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi PKB Online	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		1 paket	75.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000	1	50.000.000		275.000.000	Dishub	Pwk
			8 Pembuatan Aplikasi E-Dishub	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-					200.000.000						200.000.000	Dishub	Pwk
			9 Pengadaan Alat CCTV Kantor Dishub	Tersedianya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-	-				100.000.000						100.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			10 Pemeliharaan Alat Pengawasan dan pengendalian lalu lintas layanan CCTV dan Android	Terpeliharanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-					50.000.000		50.000.000		50.000.000		150.000.000	Dishub	Pwk
			11 Pemeliharaan Alat CCTV Kantor Dishub	Terpeliharanya Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		-							50.000.000		50.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk
			12 Kajian pembuatan Museum Lalu Lintas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknologi Perubungan		-	-	-	-		100.000.000						100.000.000	Dishub	Pwk
			13 Pembuatan aplikasi perpakiran	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknologi Perubungan		-	-	-	-				200.000.000				200.000.000	Dishub	Pwk
			14 Usulan Pembuatan Perda Tentang Angkutan Tidak Dalam Trayek	Tersedianya Dokumen Perencanaan Teknologi Perubungan		-	-	-	-			1	150.000.000				150.000.000	Dishub	Pwk
	Meningkatnya ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas	2.09.2.09.01.27	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Jumlah Sarana Prasarana Parkir			150.000.000		150.000.000		325.000.000		275.000.000		275.000.000		1.075.000.000	Dishub	Pwk
			Pengadaan Karcis Retribusi Parkir	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Karcis Retribusi Parkir		-	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	Dishub	Pwk

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Petugas Parkir	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Petugas Parkir	-	1	75.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	575.000.000	Dishub	Pwk
			Pembangunan Toilet Kantor UPTD Parkir	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Toilet Kantor UPTD Parkir	-	-	-	-	-	1	50.000.000						50.000.000	Dishub	Pwk
			Pemeliharaan barier Parkir	Betambah Usia Barrier Parkir	1	-	-	-	50.000.000	1	50.000.000		50.000.000		50.000.000		100.000.000	Dishub	Pwk
			Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Petugas Parkir	Tercapainya Kegiatan Pembinaan Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum dan Khusus Parkir	-	1	25.000.000	1		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	100.000.000	Dishub	Pwk

TABEL T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Urusan Perhubungan																	
Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika	2.739.233.500	2.250.464.625	3.942.800.000	4.343.565.000	6.211.299.900	2.389.459.191	1.865.372.590	2.960.515.196	3.545.453.287	5.914.825.281	87	83	75	82	95,22	57%	62%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	150.000.000	150.000.000	595.000.000	857.250.000	159.250.000	100.000.000	150.000.000	437.700.000	681.353.000	106.384.000	67%	100%	74%	79%	67%	27%	27%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	100.000.000	1.515.000.000	50.000.000	1.430.602.950	439.317.960	20.738.000	1.082.890.220	-	1.157.494.950	379.959.460	21%	71%	-	81%	86%	110%	458%
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2.700.179.500	3.524.101.000	3.227.360.000	2.991.840.000	2.110.000.000	2.304.255.010	3.047.341.800	3.048.079.543	2.882.185.000	1.945.562.880	85%	86%	94%	96%	92%	20%	21%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Ber	1.442.110.000	525.000.000	470.000.000	527.750.000	486.226.500	1.296.155.725	386.811.575	261.712.705	312.733.100	440.496.655	90%	74%	56%	59%	91%	8%	8%

Tabel 3.2 Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD 2018-2023

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA					
Misi II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional					
Tujuan 1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan efektif	Sasaran 1.2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang efektif dan modern	Strategi 1,2.1	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik yang efektif dan efisien berbasis teknologi Informasi
Misi III : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Strategi 3,1,1	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan

Tabel 3.2 Matriks Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dalam RPJMD 2018-2023

Visi : MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA					
Misi III : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan					
Tujuan 1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sasaran 3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Dalam rangka Percepatan Pengembangan Wilayah	Strategi 3,1,1	Meningkatkan Pemenuhan Layanan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berwawasan Lingkungan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Trayek Angkutan Umum	50	50	51	51	52	52	52
2	Jumlah Armada Angkutan Umum	1.400	1.400	1.521	1.642	1.763	1.884	1.884
3	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	4	4	1	1	1	1	8
4	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten	574	574	674	724	774	824	824
5	Jumlah Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	2	2	4	5	5	6	0
6	Persentase jaringan pelayanan Lalu Lintas sungai dan penyebrangan	-	-	1	3	4	4	5
7	Persentase angkutan umum yang melakukan uji KIR	83	83	85	88	90	91	91
8	Jumlah Dokumen Lalu lintas	2	2	3	7	7	8	29
9	Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	574	574	674	724	774	824	824
10	Panjang Marka Jalan	2800	2800	3000	3200	3400	3600	3600
11	Frekuensi Operasi Ketertiban Lalu lintas	29	29	29	29	29	29	29
12	Persentase Layanan Angkutan Darat	944,631	944,631	920,324	919,042	917,488	915.000	915
13	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	29	29	29	29	29	29	29
14	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang dikembangkan	1	1	2	2	3	3	3
15	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	4	4	5	6	6	7	7

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Prosentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	23%	23%	24%	25%	26%	27%	27%
2	Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor	80%	80%	81%	82%	83%	84%	84%
3	Prosentase dan prasarana dalam kondisi baik	17,57.%	20%	21%	22%	23%	24%	24%
4	Prosentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
5	Prosentase Perencanaan dan pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-Undangan	71%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
6	Prosentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	82.8%	83%	85%	88%	90%	91%	91%
7	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	52.13%	52.14%	50,30%	49.42%	48.30%	47.18%	47.18%
8	Jumlah dokumen lalu lintas	2	3	4	4	5	5	5
9	Rasio Terminal penumpang Angkutan Umum	1	1	1	1	1	5	5
10	Rasio pemasangan rambu-rambu	574	590	590	600	600	625	625
11	Prosentase Kendaraan Umum/ barang yang tidak laik jalan	17,2%	17,2%	15%	12%	10%	9%	9%
12	Frekuensi operasi kadar emisi gas buang yang lewat batas	12	28	28	28	28	28	28
13	Basis data lalu lintas dan sarana prasarana perhubungan (Jumlah perangkat lunak)	1	1	1	1	1	1	5
14	Pedoman bidang Perhubungan (Jumlah Perda, Perbup dan Kepbup)	1	1	1	1	1	1	6
15	Jumlah sarana prasarana parkir	4	5	6	6	7	8	

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta

Kode	Bidang Urusan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Setelah Perubahan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						2019		2020		Murni 2021		Perubahan/Parsial 2021		2022		2023			
				2017	2018	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 = (7+9+13+15+17)	20 = (8+10+14+16+18)
2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan						10.185.298.506		12.260.774.000		23.629.997.152		23.629.997.152		24.865.846.003		26.166.329.749		97.108.245.410
2.15	Perhubungan						10.185.298.506		12.260.774.000		23.629.997.152		23.629.997.152		24.865.846.003		26.166.329.749		97.108.245.410
2.09.2.09.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	100,00	5.146.948.356	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	5.146.948.356
2.09.2.09.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	865.390.800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	865.390.800
2.09.2.09.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen	100,00	100,00	100,00	199.184.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	199.184.000
2.09.2.09.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	Persen	100,00	100,00	100,00	42.615.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	42.615.500
2.09.2.09.01.07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran						0		7.730.774.000		0		0		0		0		7.730.774.000
		1 Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	

		2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana / Prasarana Kantor	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
		3 Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
		4 Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
		5 Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
		6 Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	Persen	100,00	100,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
2.09.2.09.01.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan						224.483.350		0		0		0		0		0		224.483.350
		1 Jumlah Trayek Angkutan Umum	Trayek	39,00	50,00	50,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	
		2 Jumlah Armada Angkutan Umum	Unit	1.363,00	1.378,00	1.378,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.378,00	
2.09.2.09.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan						932.692.350		1.600.000.000		0		0		0		0		2.532.692.350
		1 Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	100,00	100,00	4,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104,00	

		2 Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrail) Pada Jalan Kabupaten	Jumlah	415,00	415,00	451,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	551,00	
		3 Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Persen	0,00	0,00	2,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	102,00	
		4 Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan Penyebrangan	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	
2.09.2.09.01.20	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						1.014.639.150		400.000.000		0		0		0			1.414.639.150
		1 Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR	Persen	59,00	91,00	105,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	205,00	
		2 Jumlah Dokumen Lalu Lintas	Jumlah	0,00	0,00	1,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	101,00	
2.09.2.09.01.21	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas						1.759.345.000		0		0		0		0			1.759.345.000
		1 Jumlah Rambu, Cermin Lalu Lintas, Lampu Lalu Lintas dan Petunjuk Arah	Unit	1.448,00	3.466,00	243,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	243,00	
		2 Panjang Marka Jalan	Meter	2.600,00	2.800,00	428,45		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	428,45	
		3 Frekuensi Operasi Keterlibatan Lalu Lintas	Hari/Tahun	22,00	22,00	28,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	28,00	
2.09.2.09.01.23	Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan						0		175.000.000		0		0		0			175.000.000
		1 Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	

		2 Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen	0,00	0,00	0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	
2.09.2.09.01.25	Program Pengembangan dan Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumlah	29,00	29,00	0,00	0	100,00	2.180.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	2.180.000.000
2.09.2.09.01.26	Program Pengembangan Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	100,00	25.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	25.000.000
2.09.2.09.01.27	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumlah	4,00	4,00	0,00	0	100,00	150.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	100,00	150.000.000
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						0		0	18.340.170.115		18.340.170.115		19.299.361.012		20.308.717.593			57.948.248.720
		1 Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-	-		-		B		B		B		B		B	
		2 Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	Persen	0,00	0,00	0,00		0,00		90,00		90,00		90,00		90,00		270,00	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Prasarana Perlengkapan lalulintas dan Angkutan jalan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	90,00	5.163.698.194	90,00	5.163.698.194	90,00	5.433.759.610	90,00	5.717.945.237	270,00	16.315.403.041
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase konektivitas dan perlengkapan Angkutan Sungai dan Penyebrangan	Persen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	75,00	126.128.843	75,00	126.128.843	85,00	132.725.381	95,00	139.666.919	255,00	398.521.143

Tabel 8.2

No	Indikator	Satuan	2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	11 = (6+7+8+9+10)
C. ASPEK PELAYANAN UMUM							
2.15.0.00. Dinas Perhubungan							
2.15 Perhubungan							
3	Rasio Terminal Penumpang Angkutan Umum	Persen	100	4,00	100,00	8,00	104,00
4	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan (Rambu, dan Guardrill) Pada Jalan Kabupaten	Jumlah	-	451,00	100,00	253,00	551,00
5	Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Yang Direhabilitasi dan Terpelihara	Persen	-	2,00	100,00	100%	102,00
6	Persentase Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Sungai dan Penyebrangan	Persen	-	0,00	100,00	30,00	100,00

7	Persentase Angkutan Umum Yang Melakukan Uji KIR	Persen	100	105,00	100,00	165,90	205,00
8	Jumlah Dokumen Lalu Lintas	Jumlah	100	1,00	100,00	100,00	101,00
12	Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen	-	0,00	100,00	76,00	100,00
13	Jumlah Dokumen Lalu lintas	Persen	-	0,00	100,00	100,00	100,00
14	Jumlah Operasi Angkutan Umum Laik Jalan	Jumlah	-	0,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Yang Dikembangkan	Persen	-	0,00	100,00	100,00	100,00
16	Jumlah Sarana Prasarana Parkir	Jumlah	-	0,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan
12
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan

tabel 3.5

Arah Kebijakan RTRW Kabupaten Purwakarta yang berkaitan langsung dengan Urusan Perhubungan

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Penanggung Jawab	Biaya X Juta	Waktu Pelaksanaan			
						2012-2016	2017-2021	2022- 2026	2027-2031
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.2	Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah								
A2.2	Pembangunan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan								
	Pembangunan terminal tipe B di Sadang	Kec. Bungursari	APBD Prov, APBD	Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Parpostel	100000				
	Pembangunan terminal tipe C Wanayasa	Kec. Wanayasa	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	10000				
	Pembangunan terminal tipe C Darangdan	Kec. Darangdan	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	10000				
	Pembangunan terminal tipe C Citeko	Kec. Plered	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	10000				
	Pembangunan terminal tipe C Simpang	Kec. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	10000				
	Peningkatan terminal penumpang tipe C Ciganea	Kec. Jatiluhur	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	10000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.2.2.2	Penyediaan alat pengawasan dan pengamanan jalan								
	Optimalisasi jembatan timbang Cibaragalan Desa Ciwangi	Bungursari	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov.	1000				
	Pemeliharaan jembatan timbang Cibaragalan Desa Ciwangi	Bungursari	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov.	1000				
A.2.2.3	Pengembangan perlengkapan jalan								
	Penyediaan rambu lalu lintas	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Penyediaan rambu pendahulu penunjuk jurusan	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Pemeliharaan marka parkir	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	300				
	Pemeliharaan marka jalan	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	300				
	Pemeliharaan zebra cross	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	300				
	Penyediaan cermin tikungan	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	300				
	Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.2.3	Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan								
	Pengembangan jaringan trayek angkutan penumpang	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Peremajaan angkutan kota	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Pembangunan dan pemeliharaan halte/ shelter	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kab. Purwakarta	APBD	Dinas Perhubungan Parpostel	500				
A.2.4	Pengembangan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan sungai/waduk								
	Penetapan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan	Kec. Jatiluhur	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov	1000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan dan rehabilitasi dermaga di Waduk Jatiluhur dan Cirata	Kec. Jatiluhur dan Maniis	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov	1000				
	Peningkatan kualitas dan jumlah sarana angkutan penyeberangan di Waduk Jatiluhur	Kec. Jatiluhur	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov	1000				